

MOTIVASI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN PAKISTAN DALAM BIDANG PERTAHANAN

Oleh : Gothman Tambunan¹

Pembimbing : Faisyal Rani, S. IP, MA²

Jurusan Ilmu HUBungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jalan H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

The purpose of this research is to explain why Indonesia cooperate in defense with Pakistan in order to improve defense and security. Indonesia has a very large area, both land, air and sea, and flanked by two oceans and two continents. Many countries with great power in the world have influence in the region. Thus, Indonesia's security level must be strong to maintain the sovereignty of its territory.

The perspective used in this study is realism with Donald E. Nuechterlein national interest theory. The data used is secondary data, which comes from books, journals, mass media and internet websites. Research method is library research by analyzing data from above sources.

The results of this study show that the national interests of Indonesia are achieved in defense cooperation with Pakistan. Improving the quality of army personnel, improved relations with Pakistan especially in the defense sector.

Keywords : defence cooperate, national interest, memorandum of understading

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

² Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

A. Latar Belakang Masalah

Arus perubahan dalam politik global telah menjadikan isu internasional semakin kompleks. Pemahaman keadaan politik dan kemampuan merespon secara tepat isu-isu yang ada sekarang maupun di masa akan datang, sangat diperlukan oleh negara dalam implementasi kebijakan luar negerinya, tidak terkecuali Indonesia. Karakteristik dan dimensi hubungan antar negara yang juga menjadi rumit menuntut politik luar negeri Indonesia untuk memiliki kemampuan adaptif, antisipatif dan efektif.³

Hubungan antar-bangsa secara bilateral dengan berbagai macam motif hubungannya tidak akan lepas dari kondisi lingkungan tempat berlangsungnya hubungan internasional, serta adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. bilateral adalah suatu bentuk kerja sama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari sebrang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.⁴

Adanya saling ketergantungan antar negara dan keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi suatu hubungan, hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis

maupun fungsional yang semakin meluas dan sehingga adanya integrasi di dalamnya baik dalam segi ekonomi, politik dan pertahanan. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan militer sebagai kekuatan bersenjata ditampilkan melalui sumber daya manusia dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dibangun serta dikembangkan secara profesional.

Demikian halnya dengan Indonesia, yang melakukan kerjasama pertahanan dengan Pakistan dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Pakistan adalah hubungan didirikan dengan pandangan agama yang sama. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dalam hal populasi, sedangkan Pakistan adalah dunia kedua negara muslim terbesar. Kedua negara adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Kelompok D-8 Negara Berkembang. Pakistan memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Islamabad, dan konsulat jenderal di Karachi. Berdasarkan BBC World Service Poll tahun 2015, 80% dari masyarakat Indonesia melihat

³ Ganewati Wuryandari. 2008. Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik. P2P-LIPI Hal. 4

⁴ Budiono Kusumohamidjojo. 1987. Hubungan internasional kerangka studi analitis. Jakarta: Binacipta Hal. 95

pengaruh positif Pakistan, sedangkan 11% menyatakan pandangan negatif, menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling pro Pakistan di dunia.⁵

Indonesia dan Pakistan sudah menjalin hubungan yang baik sejak pertama kali Indonesia merdeka. Pakistan pernah mengirimkan 600 tentara untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan menahan kapal-kapal Belanda yang singgah di Pakistan tahun 1947 dalam perjalanan ke Indonesia. Presiden Soekarno juga pernah mengirimkan pasukan dan kapal TNI AL dan pesawat TNI AU untuk berpatroli di laut selatan Pakistan saat terjadinya *Second Kashmir War* antara Pakistan dan India tahun 1965. Untuk menghormati Indonesia, di Pakistan ada Soekarno Square Khyber Bazaar di Peshawar dan Soekarno Bazaar di Lahore.

B. Rumusan Masalah

Bergesernya center of gravity ekonomi dan militer dunia ke Asia Pasifik pada abad 21 ini harus menjadi perhatian khusus untuk Indonesia demi terjaganya kepentingan nasional. Paling tidak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang lalu Hillary Clinton saat kunjungannya ke Honolulu pada November 2011 pernah menyinggung mengenai pergeseran tersebut. Walaupun bukan berarti bahwa hubungan Trans-Atlantik yang sudah dibina AS sejak dahulu akan terabaikan (seperti kesuksesan NATO di Libya dan kerja sama di Afghanistan), kawasan Asia Pasifik

⁵ "Negative views of Russia on the Rise: Global Poll" dalam Artikel BBC World News dikutip dari laman <http://bbc.co.uk> diakses tanggal 26 Januari 2016

mendapat perhatian besar karena populasinya yang mencapai setengah dari penduduk dunia, ekonominya berkembang pesat, dan mempunyai beberapa pelabuhan teramai di dunia. Selain itu juga ada kekhawatiran akan penyebaran senjata pemusnah massal, bencana alam, dan emisi greenhouse gas yang tinggi.

Hal ini tentunya berpengaruh pada keamanan dan politik Indonesia. Indonesia diharapkan mengambil kebijakan strategis untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi di Asia Pasifik, khususnya karena ada dua negara superpower yang bersaing untuk mempertahankan hegemoninya, yaitu AS dan Cina. Melihat perkembangan wilayah Asia Pasifik yang saat ini diwarnai dengan berbagai macam ketegangan, Indonesia hendaknya menata lagi kebijakan luar negerinya dengan melihat pengalaman Pakistan. Pakistan mempunyai hubungan yang menarik dengan Cina dan AS. Sejak pertama kali Pakistan berpisah dari otoritas British India pada tahun 1947, AS dengan segera mendekati ke Pakistan, mengingat pengaruh Uni Soviet sudah terlihat di Iran dan Afghanistan.

Dengan berbagai latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu : **mengapa Indonesia bekerjasama bidang pertahanan dengan Pakistan?**

C. Gambaran Kekuatan Pertahanan Indonesia

Dalam kaitannya dengan tantangan global yang dihadapi dalam sistem pertahanan Indonesia sendiri, kebijakan pertahanan yang disusun Indonesia sendiri telah dilandasi oleh sejumlah tantangan

yang secara potensial maupun aktual mampu mengganggu eksistensi kedaulatan negara. Tantangan tersebut antara lain dapat berupa terorisme, ancaman keamanan lintas negara, isu senjata pemusnah massal, sengketa perbatasan, keamanan regional dan global, sumberdaya alam di Zona Ekonomi Eksklusif, degradasi lingkungan, dan kemajuan teknologi dan informasi yang dapat mengancam pertahanan Negara.⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa Buku Putih Pertahanan sebagai produk strategis tentang Kebijakan Pertahanan Negara telah memberikan rumusan dalam menangkal berbagai ancaman yang kemudian hadir di Indonesia.

Namun berdasarkan praktek di lapangan, kebijakan strategis tersebut kurang direalisasikan dalam pelaksanaan sistem pertahanan di Indonesia. Sebagai contoh pada dasawarsa 1990-an pengadaan Alutsista masih bergantung pada Amerika Serikat serta kurangnya performa dari TNI sebagai aparaturnya penjaga keamanan Indonesia baik dalam kasus terorisme maupun konflik dengan Malaysia. Konsekuensinya industri strategis perlu diberi ruang dengan mengembangkan diri sebagai industri yang spesialisasinya menciptakan, memproduksi, dan memasarkan alat-alat vital untuk kepentingan pertahanan.⁷

⁶ Djoko Sulistyono. 2010. "Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Revitalisasi Industri Strategis" dalam Forum Diskusi Center for Strategic and Global Studies (CSGS). Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Hal. 2

⁷ Ibid Hal. 4

Revitalisasi industri pertahanan dilakukan juga dengan memperkuat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam rangka peningkatan daya saing dan kapasitas produksi industri pertahanan, terwujudnya keserasian pengadaan Alutsista dari luar negeri melalui program *ToT* (*transfer of technology*), dan *joint production* dalam pengadaan dan pengembangan Alutsista TNI.⁸ Selain itu pemerintah berusaha memberikan perhatian khususnya terhadap wilayah terluar Indonesia dengan berbagai cara diantaranya pembangunan pos-pos keamanan di wilayah perbatasan, pemberdayaan dan pengelolaan, serta perundingan-perundingan mengenai keamanan perbatasan.

Mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan pokok minimum atau yang sering disebut *Minimum Essential Force (MEF)*. MEF dibagi menjadi tiga tahap rencana strategis sampai tahun 2024. Pada awalnya pemerintah mengalokasikan Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode MEF 2010-2014.⁹ Berikut ini

⁸ JHW, Edwin. 2013. "Refleksi Penyelenggaraan Pertahanan 2012" diolah dari: Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/20/MI/2013 tanggal 9 Januari 2012, tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2013. dalam <http://www.setkab.go.id/> diakses tanggal 02 Mei 2018

⁹ Dikutip dari "Minimum Essential Force TNI Tahap 2 (2015-2019)". Dalam laman JakartaGreater.com. 11 September 2013. Diakses tanggal 4 Mei 2018

adalah kekuatan TNI berdasarkan angkatan atau kesatuan yang ada di dalam tubuh TNI.

TNI AD memiliki jumlah prajurit sebanyak 273.693 dengan beberapa elemen, yaitu:¹⁰

1. Memiliki komando cadangan untuk strategi dalam angkatan darat yang mencakup 2 divisi satuan tempur, 18 batalion infranti dan 16 batalion dalam bentuk lain.
2. Memiliki komando pasukan khusus atau kopasus yang mencakup 1 tim yang berlatar pendidikan dan 4 tim untuk pasukan tempur.
3. Kekuatan yang dihimpun pada area atau zona wilayah mencakup 13 komando pada wilayah kemiliteran, 44 komando pada resort kemiliteran, 291 komando pada distrik kemiliteran serta 96 batalion yang tersedia dengan kesiapan yang telah terorganisir dengan baik setiap saat dan setiap waktu.
4. Memiliki ketahanan, keamanan dan pertahanan yang kokoh di badan pelaksana pusat yang mencakup 1 resimen zeri konstruksi yang selalu bekerja tim secara baik dan spontan, 2 skuadron penerbang TNI angkatan darat yang memiliki keberanian, kesetiaan, kecerdasan dan ketangguhan yang tidak bisa dianggap lumayan dan memiliki 5

batalion lagi yang juga telah disiapkan dengan keberanian dan kesetiaan yang tinggi.

TNI Angkatan Laut memiliki jumlah prajurit sebanyak 68.180 dengan berjalan diatas sistem senjata armada secara keseluruhan yang didalamnya terdapat elemen elemen dan memiliki tugas dan fungsi angkatan laut :

1. Memiliki kapal kapal besar dan kecil khusus milik angkatan laut yang berjumlah 71 buah yang dapat digunakan untuk pertahanan dan keamanan wilayah lautan seluruh Indonesia.
2. Memiliki 2 pasukan marinir terlatih dan mempunyai keberanian yaang tinggi dalaam mengamankan wilayah perairan diseluruh Indonesia.
3. Memiliki 1 komando marinir yang dikhususkan untuk latihan dan dapat dioperasikan diluar latihan termasuk pada keadaan genting negara.
4. Memiliki 136 pasokan armada laut republik Indonesia yang siap dan sioaga kapan saja jika dibutuhkan termasuk pada saat ada ancaman atau darurat negara diwilayah perairan Indonesia.
5. Memiliki bebrapa kekuatan dan penguasaan area atau zona laut untuk armada barat dan timur yang dipersenjantai lengfkap dengan teknik kecakapan yang tinggi.

¹⁰ Connie Rahakundini Bakrie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 102

6. Memiliki pangkalan utama armada angkatan laut yang mencakup kelas A yang berjumlah 11, Kelas B berjumlah 24, Kelas C berjumlah 19 dan untuk kelas khusus berjumlah 3. dimana semua pangkalan sudah diotomatiskan untuk dapat dioperasikan atau diperintahkan oleh atasan termasuk presiden setiap waktu dan berjalan dengan siaga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TNI Angkatan Udara memiliki jumlah prajurit sebanyak 27.590 dengan berbagai elemen, yaitu :¹¹

1. Memiliki skuadron udara yang cukup mumpuni dengan jumlah pesawat tempur yang ditargetkan negara akan mencapai angka 180 ditahun 2024.
2. Memiliki 2 skuadron udara yang dikhususnya untuk latihan setiap hari atau dihari hari tertentu ketika diperlukan. 2 Skwadron tersebut telah dibekali banyak pengetahuan tentang penguasaan dan pengendalian pertahanan dan keamanan diudara.
3. Memiliki 5 skuadron khusus untuk daya angkut personel dan rakyat biasa yang bisa digunakan dalam pengangkutan manusia dalam jumlah besar.
4. Memiliki 1 pesawat yang ditugaskan khusus untuk pengintaian dan penelitian, dioperasikan oleh prajurit prajurit terpilih dan mempunyai penguasaan dan

¹¹ *Lokcit* Connie Rahakundini Bakrie. 2007 Hal. 102

pengendalian atas wilayah udara negara kesatuan republik Indonesia yang dapat diperintah setiap waktu termasuk pada saat genting atau darurat negara.

D. Kerjasama Indonesia dengan Pakistan dalam Bidang Pertahanan

Hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan militer Pakistan telah berlangsung lama dan berjalan baik hingga sekarang. Seiring dengan berjalannya hubungan tersebut, untuk terus menjaga hubungan baik tersebut maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama secara resmi melalui perjanjian. Peningkatan dari wujud kerja sama ini telah dituangkan dalam *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan).¹²

Penandatanganan MoU mengenai kerjasama pertahanan ini, Pakistan diwakili oleh Menteri Federal Urusan Pertahanan Pakistan, Chaudry Ahmad Mukhtar dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 21 Juli 2010. Dan Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Prof. Ir.

¹² Dikuti dari “Panglima TNI dan Dubes Pakistan Bahas Kerjasama Militer” dalam laman <http://www.tni.mil.id> diakses tanggal 10 Mei 2018

Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D.

Adapun salah satu isi dari perjanjian kerjasama pertahanan yang akan ditandatangani adalah kesepakatan mengenai akan diadakannya dialog dan konsultasi bilateral secara regular antara kedua negara dalam bidang strategis dan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama. Hal lainnya yang termasuk dalam perjanjian kerjasama pertahanan tersebut adalah, pertukaran informasi dalam hal pertahanan termasuk di dalamnya mengenai organisasi, doktrin dan kebijakan pertahanan. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, latihan bersama, dan saling tukar informasi serta bentuk-bentuk kerjasama teknis lainnya yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama.

Perjanjian pertahanan tersebut juga memuat mengenai upaya untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, latihan bersama, pertukaran pengamat militer dalam mengawasi latihan dan pertukaran pendidikan keahlian, peralatan dan aktifitas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Serta kerjasama di bidang pertahanan lainnya yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dibicarakan oleh

Komisi I DPR dengan pakar pertahanan Kusnanto Anggoro yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung, di ruang Rapat komisi I DPR Senayan pada Rabu 19 November 2014. Pembahasana ini juga menyertakan mengenai kerjasama dengan bidang yang sama terhadap Pemerintah Republik Demokrat Timor Leste. Sebagai perwakilan pemerintah, Presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas kedua RUU tersebut bersama-sama dengan DPR.¹³

Hasil dari ratifikasi perjanjian pertahanan Indonesia dengan Pakistan tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang “Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*).¹⁴

E. Pembahasan

Hubungan bilateral seringkali dilaksanakan karena adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai oleh

¹³ Dikutip dari “Komisi I Bahas Ratifikasi Pertahanan RI-Pakistan & Timor Leste” dalam laman <http://www.dpr.go.id> diakses tanggal 10 Mei 2018

¹⁴ Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015

masing-masing negara yang berhubungan. Demikian juga halnya dengan Indonesia, yang melihat bahwa Pakistan memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Dengan kondisi militer Pakistan yang besar dan kuat dibandingkan dengan Indonesia, melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Kemandirian militer Indonesia yang masih sangat kurang, sehingga dengan adanya transfer pengalaman, ilmu, dan teknologi dari Pakistan, Indonesia dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki yang menjadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia kedepannya khususnya dalam bidang pertahanan.

Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan Indonesia dengan Pakistan telah berlangsung sejak lama. Dimulai dengan saling mengakui kedaulatan, saling kunjung ke negara yang satu dengan yang lain. Kegiatan yang diadakan sesuai dengan kerjasama yang dijalin, baru hanya dalam peningkatan kualitas tentara diantara kedua negara. Hal ini terlihat dari saling membagi terkait informasi perkembangan dunia kemiliteran dan pertukaran anggota militer untuk belajar di masing-masing negara.

Waktu yang dibutuhkan Indonesia dalam meratifikasi MoU yang sudah ditandatangani sebagai bentuk resmi suatu perjanjian kerjasama sangat lama. Dari awal penandatanganan MoU pada tahun 2010, DPR RI baru membahas ratifikasinya pada tahun 2015. Waktu yang dinilai cukup lama ini berakibat pada kerjasama yang dilaksanakan pun hanya sebatas kunjungan para petinggi militer kedua negara

tersebut. Ratifikasi terhadap suatu MoU sangat, apalagi menyangkut keamanan negara, agar terdapat adanya suatu hukum yang mengikat apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Namun pasca ditandatanganinya ratifikasi MoU menjadi Undang-undang, terjadi peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Pakistan. Kunjungan kerja para petinggi militer kedua negara pun semakin intens. Hal ini juga didukung oleh adanya agenda dua tahunan terutama yang dilaksanakan oleh TNI AL dengan SSG Pakistan Navy, yang akan melakukan latihan militer bersama dengan jangka waktu 8-10 hari, yang akan dilaksanakan sekali dalam 2 tahun, dan dilaksanakan secara bergantian sebagai tuan rumah tempat berlangsungnya kegiatan latihan perang bersama.

Dengan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh Pakistan, menjadikannya salah satu negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dikawasan Asia Selatan. Kebijakan luar negeri yang tidak terprediksi, dimana menjalin hubungan yang baik dengan semua kekuatan di dunia (AS, Russia, Cina dan Negara Arab). Perkembangan nuklirnya juga sangat pesat, yang menjadikannya salah satu negara dengan kekuatan nuklir di dunia. Hal ini menjadi modal Indonesia untuk lebih meningkatkan hubungan yang baik dengan Pakistan, untuk memberikan pengaruh di Asia Selatan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa

motivasi Indonesia bekerjasama bidang pertahanan dengan Pakistan adalah untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan pada personil tentara dan peningkatan kualitas alutsista TNI. Hal tersebut dapat tercapai dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan isi perjanjian, yang tentunya mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, yaitu peningkatan kualitas prajurit dan peningkatan kualitas alutsista.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Pakistan telah berjalan selama kurang lebih 70 tahun dan telah banyak menghasilkan kerjasama diberbagai bidang dan salah satunya dalam bidang pertahanan. Indonesia senantiasa menekankan pentingnya membangun kemitraan dalam menjaga hubungan dengan negara lain untuk meningkatkan pertahanana negara.

Sesuai dengan teori Kepentingan Nasional yang di kemukakan oleh Donald Nuechterlein, kepentingan yang ingin dicapai Indonesia dalam kerjasama pertahanan dengan Pakistan adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan Pertahanan. Dengan adanya kerjasama ini, peningkatan pertahanan Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan (seperti peningkatan kualitas personil militer Indonesia) dan menjaga hubungan yang baik diantara negara dalam bidang militer (pertahanan)
2. Kepentingan Politik. Kepentingan politik yang diharapkan Indonesia dari kerjasama ini adalah untuk

menunjukkan pengaruh Indonesia di dunia internasional secara khusus di kawasan Asia Selatan, mengingat bahwa Pakistan merupakan salah satu negara dengan pertahanan kuat di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Agussalim, Dafri .”Perimbangan Kekuatan Militer di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin”. Jurnal Sosial Politik, Vol. 3 No.1 (1999) 16-39. Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Baloch, Jamshed Ali, Kiran Sami Memon, dan Humera Hakro. 2014. “Challenges to Foreign Policy of Pakistan in 21st Century”. *Research Journal of Political Science. Vol 3*

Caesar Ardian Oktawa dan Titik Firawati, MA. 2015. “Kajian kebijakan pertahanan Indonesia terhadap keamanan maritim di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”. *Jurnal Pasca Sarjana Jurusan Hubungan Internasional*

- Chaziz, Mordechai 2016. "China–Pakistan Relationship: A Game-changer for the Middle East?". *Contemporary Review of the Middle East*. 3(2)
- Djoko Sulistyono. 2010. "Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Revitalisasi Industri Strategis" dalam *Forum Diskusi Center for Strategic and Global Studies (CSGS)*. Departemen Hubungan Internasional FISISP Universitas Airlangga :
- Frankel, J. 1970. *National Interest: A Vindication*. *International Journal*
- Iram Khalid : *An Appraisal of Pakistan's Nuclear Policy During War on Terror*. A Research Journal of Asian Studies, Vol.31, No.1, January-June 2016
- Irmawan Effendi. 2005. "[Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik](#)" *Jurnal Siklus* Vol. 1 No. 3 Tahun 2005 ISSN 0216-5635. Institut
- Khan, Ijaz. 2007. "Pakistan's Post Afghan Policy Shift Impact on Pak-India-Afghan Geopolitic". *Journal of Asian and African Studies*. 42(5): 461-475.**
- Khairunnisa, "Kebijakan Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik 2009-2012". *eJurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 3 (2013) 589-604. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor: Ponorogo
- Nuechterlein, Donald E. 1976. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. *British Journal of International Studies*, Vol 2 p.248
- _____ 1979. *The Concept of "National Interest": A Time for New Approaches*. *British Journal of International Studies*, Vol 2 p. 126
- Sajeela Yousaf, dan Shaista Tabassum. 2003. "Foreign Policy of Pakistan: Challenges and Opportunities". *Journal*

Buku :

- Acharya, Amitav. 2003. *Regionalism and Multilateralism : Essay on Cooperative Security in the Asia Pacific*. Eastern University Press: Singapura
- Bakrie, Connie Rahakundini 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Breuning, Marijke. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21*. Jakarta: Kencana.
- Dunne, Tim & Brian C. Schmidt. 2001. *Realism dalam John Baylis and Steve Smith (eds.), "The Globalization of World Politics"*. Oxford University Press : New York
- Gautama, Sidarta. 2004. *Megawati Soekarno Putri*. Rineka Cipta: Jakarta
- Hara, [Abubakar Eby](#). 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai*
- Hocking, Brian and Michael Smith. 1990. *World Politics: An Introduction to International Relations*. Harvester Wheatsheaf: London
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Djuanda)* Binacipta: Bandung
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 1999. *"Pengantar Studi Hubungan Internasional"*. Oxford University Press : New York
- Kartasasmita, Koesnadi 1997. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administras : Bandung
- Kindleberger, Charles P. 1982. *"Dominance and Leadership in the International Economy"*. International Studies Quarterly
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Bina Cipta: Jakarta

- Makmun, Abin Syamsuddin .2003. *Psikologi Pendidikan*. Rosda. Karya Remaja: Bandung
- Mas' oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Edisi Revisi)*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
- _____ 1987. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Sitepu, Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Theodore, A. Couloumbis & Wolfe, James H. 1999. *Pengantar Hubungan internasional: Keadilan dan Power*. CV Abardin: Bandung
- Uno, Hamzah. B. 2007. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi. Aksana
- Weiner, Bernard 1990. "History of Motivational Research in Education" dalam *Jurnal of Educational Phychology*. Univ. Of Calofornia: Los Angeles
- Wuryandari, [Ganewati](#). 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. P2P-LIPI : Jakarta
- Dokumen Resmi*
- United States Departement of Defence. Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving US National Security Objective In A Changing Enviroment. Washington. 2015.
- Laman Internet*
- ["15 Prajurit TNI Ikuti Farewell Ceremony di Haiti"](#). Poskota Online. 11 Februari 2013. Diakses tanggal 04 Mei 2018
- ["2013 World Service Pol"](#) dalam laman <https://globescan.com> diakses tanggal 10 Mei 2018
- "29 February 1956 - Pakistan becomes a republic". <http://sify.com>. 29 February 2008. Diakses tanggal 10 Mei 2018
- Agil Iqbal Cahaya (12 April 2012). "Transformasi Bisnis TNI dalam Menjalankan Amanat UU No. 34 Tahun 2004". Dalam laman <http://www.setkab.go.id>.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 04 Mei 2018. <http://kemenkeu.go.id> diakses tanggal 04 Mei 2018
- “*Alasan Indonesia Mendukung Pakistan daripada India*” dalam laman <https://historia.id> diakses tanggal 10 Mei 2018
- “*Anggaran Polri dan TNI Dinilai Tidak Berimbang*”. Dalam laman <http://www.dpr.go.id>. diakses tanggal 4 Mei 2018
- “*Budget in Brief APBN-P 2015*”. Dalam laman <http://kemenkeu.go.id> diakses tanggal 04 Mei 2018
- “*Doktrin TNI*”. Dalam laman. <http://www.tni.mil.id>. diakses tanggal 04 Mei 2018
- Heyder Affan (26 November 2013). “*Dwifungsi ABRI, asas tunggal hingga P4*”. *BBC Indonesia*. Dikutip dari “*Arti Singkatan FABRI / Kepanjangan Dari FABRI - Kamus Akronim Bahasa Indonesia*” dalam laman <http://organisasi.org>. diakses tanggal 04 mei 2018
- “*Informasi APBN Tahun 2016*”. Dalam laman <http://kemenkeu.go.id> diakses tanggal 04 Mei 2018
- JHW, Edwin. 2013. “*Refleksi Penyelenggaraan Pertahanan 2012*” diolah dari: Keputusan Menteri Pertahan Nomor: KEP/20/M/I/2013 tanggal 19 Januari 2012, tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2013. dalam <http://www.setkab.go.id/> diakses tanggal 02 Mei 2018
- “*Kerjasama Militer Indonesia Pakistan*” dalam laman <https://jakartagreater.com> diakses tanggal 10 Mei 2018
- “*Komisi I Bahas Ratifikasi Pertahanan RI-Pakistan & Timor Leste*” dalam laman <http://www.dpr.go.id> diakses tanggal 10 Mei 2018
- “*Menlu AS kunjungi Indonesia*”. *BBCIndonesia.com*. Diakses tanggal 04 Mei 2018
- “*Negative views of Russia on the Rise: Global Poll*” dalam Artikel BBC World News dikutip dari laman <http://bbc.co.uk> diakses tanggal 26 Januari 2016

“Panglima TNI dan Dubes Pakistan Bahas Kerjasama Militer” dalam laman <http://www.tni.mil.id> diakses tanggal 10 Mei 2018

“Pemerintahan Presiden BJ. Habibi” dalam laman <http://mbokemban.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 02 Mei 2018

“Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas” dalam laman <https://www.cnnindonesia.com> diakses tanggal 02 Mei 2018

“South Asia and the Gulf lead rising trend in arms imports, Russian exports grow” dalam laman <http://www.sipri.org/> diakses tanggal 26 Januari 2016